

PAPER NAME

Perilaku Memilih_JIMD_2014.pdf

AUTHOR

Hertanto Hertanto

WORD COUNT

5852 Words

CHARACTER COUNT

35522 Characters

PAGE COUNT

20 Pages

FILE SIZE

456.2KB

SUBMISSION DATE

Aug 28, 2022 5:58 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 28, 2022 5:59 PM GMT+7**● 10% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material

PERILAKU MEMILIH MAHASISWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI LAMPUNG

Oleh: Hertanto*

ABSTRACT

This study aims to: (1) identify trends in students in selecting candidates and political parties, (2) know the reasons students choose candidates and political parties, and (3) explain the factors that led to the student in choosing difficult. To explain the purpose of this study used a behavioral approach choosing (voting behavior). While the types of research using qualitative methods of data collection through interviews and open questionnaires. The results showed that (1) students tend to choose based nationalist political party, the PDI-P, the Democratic Party, and Gerindra. In selecting candidates for the legislature and the executive (the prospective governor/vice governor), students tend to prefer candidates who are well known and have an emotional attachment; (2) The reasons students choose a political party because he felt the presence of emotional closeness with the concerned parties or the candidates (candidates) are carried by the parties concerned. (3) Students assume the 2014 election had a lot of trouble to vote, because it is only 9.58% which assumes no difficulty in choosing. While the cause is considered to be the most difficult in choosing is non-technical factors such as too many candidates, the candidates are not known, ballots that are too big, and not accompanied by photographs candidates (DPRD).

Keywords: political participation, voting behavior, political parties, elections.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Mengapa mahasiswa memilih partai politik (parpol) atau calon tertentu dan bukan parpol dan calon lain dalam pemilihan umum (pemilu)? Jawaban atas pertanyaan itu dapat dibedakan berdasar lima faktor sesuai pendekatan yang digunakan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional (Surbakti 2002: 145). Pendekatan structural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan dan

program yang ditonjolkan oleh partai. Pendekatan sosiologis menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Pilihan seseorang pada pemilu dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Pendekatan ekologis apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Pendekatan ekologis ini penting karena karakteristik

* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

data hasil pemilu untuk tingkat provinsi berbeda dengan karakteristik data kabupaten; atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan data tingkat kecamatan (Surbakti 2002: 146). Pendekatan psikologis menekankan kepada tiga aspek variabel psikologis sebagai telaah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat. Intinya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengan seseorang merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan pilihan rasional lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi (Surbakti 2002: 146). Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Namun di Negara-negara Berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan secara otonom oleh pemilih, tetapi seringkali diintervensi oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu (agama, kepala suku/adat, tuan tanah/majikan, pejabat pemerintah/

birokrasi, militer, polisi). Pengaruh para pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi seringkali berupa manipulasi, intimidasi, ancaman, dan paksaan (Surbakti 2002: 147). Sehingga ada sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Angka masyarakat yang tidak memilih atau golput (Golongan Putih) dari pemilu ke pemilu terus meningkat.

Kecenderungan golput meningkat ditunjukkan pada Pemilu 1999 angka golput sebesar 10,21 persen. Pada Pemilu 2004 angka golput naik menjadi 23,34 persen. Sedangkan pada Pemilu 2009 angka golput semakin bertambah menjadi 29,01 persen. Jika golput atau "golongan putih" makin banyak, timbul kekhawatiran bahwa pada pemilu nanti "golongan hitam" yang menang. Padahal pemilu dapat "menentukan" nasib bangsa Indonesia pada masa mendatang (Amin 2014). Setidaknya, ada lima faktor yang membuat orang tidak memilih karena adanya faktor teknis dan pekerjaan merupakan faktor internal serta faktor eksternal yang terdiri dari masalah administratif, sosialisasi dan politik. Kelima faktor ini berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput.

Pemilihan umum tahun 2014 adalah pemilu yang keempat pada periode pascareformasi politik di Indonesia. Pemilu keempat pascareformasi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR

RI); Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota; dilaksanakan pada 9 April 2014 (UU Nomor 8 tahun 2012). Secara nasional pemilu ini dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan, Pemilu Presiden diselenggarakan pada 9 Juli 2014 yang menghasilkan pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, yang dicalonkan oleh koalisi PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

Di Provinsi Lampung, pemilu nasional 9 April 2014 dilaksanakan secara serentak berbarengan dengan pemilukada untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode 2014-2019 yang dimenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, yang dicalonkan oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Demokrasi Kebangsaan. Pemilu serentak diharapkan menjadi solusi bagi kemahalan pemilu dalam rangka efisiensi dana, waktu, dan mengurangi kejenuhan masyarakat dalam memilih. Dengan demikian pemilih di Lampung pada 9 April 2014 datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI); Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi,

kabupaten/kota, dan pasangan calon gubernur/wakil gubernur. Artinya para pemilih di Lampung mencoblos lima kartu suara, satu kartu lebih banyak dibandingkan dengan pemilih di provinsi lain di Indonesia.

Banyaknya tingkatan pemilu dan jumlah kartu suara ini akan menambah tingkat kesulitan memilih bagi masyarakat di Lampung, apalagi waktu berakhirnya masa pencoblosan tidak bertambah (sama secara nasional, pukul 08.00-13.00). Hal ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap tingkat kesalahan mencoblos dan jumlah kartu suara yang tidak sah.

Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba menjawab masalah sebagai berikut:

1. Apa kecenderungan memilih mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila pada Pemilu 2014?
2. Apa alasan memilih mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila pada Pemilu 2014?
3. Bagaimana tingkat kesulitan dalam memilih pada Pemilu 2014 menurut persepsi mahasiswa?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum di Negara Demokrasi

Demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat. Negara yang demokratis adalah negara yang meletakkan kedaulatan (kekuasaan) tertinggi di tangan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Miriam 2008). Ciri khas dari negara demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pemerintah yang terbatas kekuasaannya adalah pemerintah yang dibatasi hak-hak dan kewajibannya melalui konstitusi, termasuk dibatasi periode dan masa jabatannya. Untuk itu, konstitusi negara menetapkan mekanisme untuk memilih dan menyeleksi para penyelenggara negara secara berkala melalui pemilihan umum (pemilu) oleh rakyat.

Dengan demikian, pemilu sangat penting di negara demokrasi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak absolut/mutlak dan sewenang-wenang. Bagi Indonesia, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis (UU Nomor 8 tahun 2012).

B. Hubungan Sistem Pemilu, Sistem Kepartaian, dan Sistem Pemerintahan

Dalam negara modern, pada umumnya presiden dan anggota badan legislatif dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah struktur kompetisi dan kerjasama partai politik (Pennings & Lane dalam Sigit Pamungkas, 2011: 42). Arena kompetisi dan kerjasama parpol itu adalah pemilu. Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan kesesuaian sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai sering disebut paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik presidensiil maupun sistem parlementarian. Sedangkan, sistem multipartai hanya cocok pada sistem pemerintahan parlementarian (Sigit, 2011: 55).

Sistem multipartai dengan sistem presidensialisme dianggap kombinasi yang tidak cocok, karena bisa berakibat pada rendahnya keberlanjutan stabilitas demokrasi (Mainwaring dalam Sigit, 2011: 55-56). Mainwaring menyebutkan tiga

alasan utama problematik tersebut: pertama, presidensialisme multipartai cenderung menghasilkan imobilitas (kemacetan) atau jalan buntu (*deadlock*) eksekutif atau legislatif yang membuat destabilitas demokrasi. Kedua, multipartai menghasilkan polarisasi ideologi dibandingkan sistem dwipartai. Ketiga, presidensialisme multipartai sulit dalam membangun koalisi antarpantai. Presidensialisme multipartai rawan bagi stabilitas demokrasi karena tidak adanya insentif (pendorong) untuk membentuk koalisi. Sementara, sistem parlementarian sepanjang waktu mengembangkan insentif untuk memproduksi koalisi mayoritas. Dengan kata lain, logika politik sistem parlementer adalah kooperasi dan konsensus, sedangkan logika politik presidensialisme adalah konflik tersembunyi.

C. Perilaku Memilih

Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). David Moon dalam Bismar (2011: 1-60), mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku *non-voting* yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu;

dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tidak memilih berasal dari luar dirinya.

Faktor teknis adalah ¹ kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara) ¹ untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa ditolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, atau sedang berada di luar kota.

Teknis yang dapat ditolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melekat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, atau merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. ¹ Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga kategori yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

Sosialisasi atau ⁷ menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan kepada partai, ³ tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan.

Kondisi inilah yang mendorong masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, anggapan bahwa politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik, sehingga membuat sebagian masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih.

⁸ METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif ⁸ yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku, persepsi, motivasi, sikap, dan tindakan ¹⁹ yang dapat diamati secara holistik (Bogdan & Taylor 1975). Data yang dikumpulkan mengenai situasi atau kejadian dan faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan dari mahasiswa peserta mata kuliah Partai Politik dan Pemilihan Umum ¹³ di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mahasiswa yang dijadikan sebagai informan penelitian ini berjumlah 184 orang. Lokasi penelitian di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Bandar Lampung dan data dikumpulkan dalam kurun waktu 9 April 2014 (saat hari pencoblosan) sampai dengan 9 Mei 2014. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sengaja dipilih sebagai informan dengan asumsi mereka sangat memahami tujuan

dan pelaksanaan pemilu. Mahasiswa memiliki kesadaran politik dan pengetahuan tentang sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia, sehingga dianggap yang paling siap untuk berpartisipasi dalam pemilu. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan kuesioner.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi, prosentase dan penafsiran. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data non-angka, hasil wawancara, catatan lapangan, artikel, foto, gambar, atau film. Analisis kualitatif mencari pola umum dari deskripsi kata-kata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kecenderungan Mahasiswa Dalam Memilih Partai Politik

Perilaku memilih mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, perbedaan-perbedaan agama, bahasa dan nasionalisme. Kedua, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-des), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Ketiga, perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa,

kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Keempat, identifikasi partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Kelima, ² pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Pertimbangan lain adalah faktor kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok, dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Sebagian warga masyarakat juga menggunakan hak pilih berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan akurat, seperti tradisi, ideologi, dan citra partai.

Namun, dalam kenyataan di negara-negara berkembang (seperti Indonesia) perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh keenam pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Kepemimpinan yang dimaksud berupa kepemimpinan tradisional (kepala adat dan kepala suku), religius (pemimpin agama), patron-klien (tuan tanah-buruh penggarap), dan birokratik-otoriter (para pejabat

pemerintah, polisi, dan militer). Pengaruh para pemimpin ini tidak selalu berupa persuasi, tetapi acap kali berupa manipulasi, intimidasi, dan ancaman paksaan. Namun mahasiswa dengan tingkat kesadaran politiknya, setidak-tidaknya diasumsikan terbebas dari pengaruh intimidasi pihak-pihak eksternal.

Berdasarkan analisis data, kecenderungan mahasiswa memilih parpol untuk DPR RI adalah Partai Demokrat (26,60%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (20,21%), dan Partai Gerindra (11,70%). Artinya persepsi mahasiswa terhadap Partai Demokrat (PD) masih baik, sebagaimana pada Pemilu 2009 dimana PD menang secara nasional. Partai Demokrat masih paling populer dan disukai oleh para mahasiswa. Adapun Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) paling tidak disukai oleh mahasiswa. Dua partai ini tidak ada satupun mahasiswa yang memilih untuk tingkat DPR. Fenomena lain yang menarik pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai pendatang baru yang pertama kali mengikuti pemilu. Partai Nasdem bisa mengalahkan partai-partai lama yang sudah beberapa kali mengikuti pemilu, seperti Partai Golkar, PKB, PPP, dan Hanura (lihat tabel 1 pada lampiran).

Adapun, kecenderungan mahasiswa memilih parpol untuk DPRD Provinsi Lampung adalah Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (17,02%), Partai Gerindra (14,89%), Partai Demokrat (13,83%). Artinya persepsi mahasiswa terhadap Partai Demokrat mengalami pergeseran kepada PDIP pada tingkat provinsi. Namun, mahasiswa yang tidak memilih atau Golput justru mengalami peningkatan dari 6,38% menjadi 15,96%. Namun ada peningkatan suara untuk PBB yang pada tingkat DPR tidak dipilih mahasiswa, dimana pada tingkat provinsi dipilih oleh satu orang mahasiswa. Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tetap tidak mendapatkan satupun suara mahasiswa (lihat tabel 2 pada lampiran).

Kecenderungan mahasiswa memilih parpol untuk tingkatan DPRD kabupaten dan kota di Lampung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (17,02%), Partai Gerindra (13,83%), dan Partai Demokrat (11,70%). Artinya mayoritas persepsi mahasiswa terhadap Partai pilihan di tingkat provinsi sama dengan di tingkat kabupaten kota. Dalam hal ini mahasiswa konsisten dalam memilih parpol di Lampung. Namun, mahasiswa yang tidak memilih atau Golput masih cukup besar, yaitu 13,83%. Sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masih konsisten tidak dipilih oleh mahasiswa mulai dari arena pemilu tingkat DPR, DPRD provinsi, serta

DPRD kabupaten dan kota (lihat tabel 3 pada lampiran).

Dengan demikian, secara umum, realitas perilaku memilih menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa yang konsisten dalam memilih satu partai yang sama pada semua tingkat arena pemilihan (DPR, ¹⁶ DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Namun ada beberapa parpol yang tingkat konsistensinya tinggi untuk dipilih mahasiswa, yaitu ¹⁵ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara, mahasiswa paling tidak konsisten dalam memilih Partai Demokrat, karena mengalami penurunan yang sangat tajam dari level DPR ke DPRD. Fenomena yang sama terjadi pada Partai Golkar dan Nasdem walaupun pergeseran suaranya tidak setajam Partai Demokrat. Fenomena lain adalah meningkatnya jumlah mahasiswa yang tidak memilih dari tingkat DPR dan DPRD (lihat Tabel 4 dalam lampiran).

B. Alasan Mahasiswa Memilih Partai Politik dan Calon

1. Alasan Memilih Partai Politik

Secara umum, mayoritas mahasiswa memilih parpol karena alasan kedekatan emosional dengan parpol yang bersangkutan atau dengan calon legislatif (caleg) yang diusung oleh parpol yang bersangkutan (lihat Tabel 5 dalam

lampiran). Kedekatan emosional ini ditunjukkan dengan adanya hubungan persaudaraan, kekerabatan, atau mengenal baik calon legislatifnya (caleg). Artinya, sebagian pemilih mahasiswa masih mempertimbangkan faktor sentimen primordial dalam memilih pada pemilu.

Alasan kedua, mahasiswa memilih parpol adalah karena ideologi, *platform*, program partai, atau visi dan misi yang diusung oleh parpol. Pertimbangannya adalah faktor kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok, dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Sebagian warga masyarakat juga menggunakan hak pilih berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan akurat, seperti tradisi, ideologi, dan citra partai. Dengan demikian, persepsi pemilih mahasiswa atas partai-partai yang ada memiliki keterikatan emosional terhadap partai-partai tertentu. Partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

2. Alasan Memilih Calon DPD RI dan Pasangan Calon Gubernur

Hasil perhitungan akhir KPU Lampung terhadap perolehan suara terbanyak empat calon DPD untuk perwakilan Lampung, yaitu: Anang

Prihantoro, Ahmad Jajuli, Andi Surya, dan Syarif. Ketiga calon pertama sebelumnya berasal dari anggota partai politik, yaitu Anang Prihantoro dari PDI-P, Ahmad Jajuli dari PKS, dan Andi Surya dari Partai Hanura. Sementara Syarif memiliki basis massa di Lampung Tengah, sekaligus sebagai kerabat dari Wakil Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang sedang menjabat saat ini (2010-2015).

Mayoritas mahasiswa (59 orang) tidak memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerahnya (lihat Tabel 6 pada lampiran). Alasannya karena mereka tidak ada yang mengenal di antara 26 calon yang ada. Sedangkan sebagian besar mahasiswa yang memilih calon DPD karena alasan kedekatan emosional dengan calon (hubungan saudara, kerabat dekat, sahabat, serta mengenal baik calon). Sebagian mahasiswa yang lain memilih calon DPD karena alasan ketokohan calon (penampilan, wibawa, putra daerah, dan pencitraan). Artinya identifikasi pemilih terhadap calon mempunyai peranan besar bagi mahasiswa dalam memilih calon Dewan Perwakilan Daerah.

Sedangkan calon anggota DPD yang banyak dipilih mahasiswa adalah Andi Surya, berikutnya Achmad Syabirin H.A Koenang, Syarif, dan Ahmad Jajuli. Tiga calon yang dipilih mahasiswa ini juga dipilih oleh mayoritas masyarakat sehingga menjadi calon terpilih, hanya Syabirin

Koenang yang tidak terpilih. Sedangkan Anang Prihantoro yang mendapatkan suara terbanyak pada tingkat daerah ternyata tidak satu pun dipilih oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas calon yang bersangkutan rendah di mata mahasiswa.

Sementara itu, persepsi mahasiswa dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014-2019 menunjukkan perilaku yang berbeda antara mayoritas pemilih masyarakat Lampung dengan para pemilih mahasiswa. Hasil akhir pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, ⁵ dimenangkan oleh pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dengan perolehan total suara 1.816.533 (44,81%). Namun, mayoritas mahasiswa FISIP lebih memilih ⁵ pasangan Herman H.N.- Zainuddin Hasan yang memperoleh total suara sah 1.342.763 (32,12%) dan menduduki rangking kedua dalam perhitungan suara akhir. Alasan mayoritas mahasiswa memilih pasangan calon gubernur adalah karena faktor kapabilitas calon, terutama menyangkut aspek pendidikan, performa, dan kepemimpinan (lihat Tabel 7 pada lampiran).

3. Alasan Mahasiswa Tidak Memilih

Sebagian besar mahasiswa tidak memilih dalam pemilu 2014 karena alasan teknis: seperti sedang berpergian, ada keperluan penting, atau berada di luar kota. sebagian yang lain tidak memilih karena alasan administratif: seperti tidak terdaftar di DPT wilayah masing-masing (lihat Tabel 8 pada lampiran). Faktor teknis adalah ¹ kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara) ¹ untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, atau sedang berada di luar kota.

Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melekat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, atau merencanakan liburan pada saat hari

pemilihan. Faktor kedua mahasiswa tidak memilih dalam Pemilu 2014 adalah persoalan administratif yang bersifat eksternal. Ada tiga kategori faktor eksternal yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik. Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Di antaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan.

Ternyata kecil alasan faktor politik sebagai alasan atau penyebab mahasiswa tidak mau memilih, yaitu beralasan ketidakpercayaan partai politik. Dimana, peserta pemilu (calon, parpol) diindikasikan menggunakan politik uang dan visi misi untuk perubahan tidak jelas. (lihat Tabel 8 pada lampiran). Faktor politik mencakup ketidakpercayaan kepada partai, ³ tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Mahasiswa Sulit dalam Memilih

Banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam memilih pada Pemilu 2014 di Lampung. Mayoritas mahasiswa menganggap Pemilu 2014 banyak kesulitan untuk memberikan suara dan 9,58% yang menganggap tidak

mengalami kesulitan dalam memilih (lihat Tabel 9). Sedangkan faktor yang dianggap paling menyulitkan dalam memilih adalah karena nonteknis seperti terlalu banyak nama calon, banyak dari calon yang belum dikenal, kertas suara yang terlalu besar, dan tidak disertai foto calon legislatif (DPRD).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Mahasiswa Sulit dalam Memilih

Bentuk Kesulitan	F	%
Teknis (cara pencoblosan, cara melipat kertas suara, kurangnya bilik),	28	29,79
Administrasi (terlambatnya pembagian Kartu Pemilih, DPT yang bermasalah, cara pindah TPS yang rumit),	5	5,32
Nonteknis, seperti terlalu banyak nama calon, banyak dari calon yang belum dikenal, kertas suara yang terlalu besar dan tidak disertai foto calon legislatif (DPRD).	52	55,32
Tidak ada kesulitan	9	9,58
Jumlah	94	100

Sumber: Penelitian 2014

Faktor kesulitan tersebut mempunyai dua dimensi yang perlu diperbaiki di masa depan. Pertama, kesulitan itu muncul sebagai konsekuensi dari berlakunya sistem kepartaian dan pemilu yang diterapkan. Sistem multipartai dan pemilu proporsional menyebabkan banyaknya jumlah calon legislatif yang dimajukan oleh setiap partai. Faktor kedua, sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa,

bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Sedangkan Pemilu 2014 diikuti oleh 12

parpol nasional dan tiga parpol lokal di Aceh.

Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya. Dimana pada era Orde Baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada pemilu 2009 dimana pemilih tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai (*contreng*), namun pemilu 2014 kembali dengan cara mencoblos.

Perbaikan lain yang perlu dilakukan adalah perubahan tata cara memilih yang saat ini dilakukan secara manual perlu diperbaiki dengan cara elektronik (*e-voting*). Di samping memudahkan, cara ini akan menyingkat waktu yang sangat efektif bagi para pemilih. Sedangkan untuk mengurangi para pemilih yang tidak mengenal para calon yang dimajukan oleh parpol, sehingga lebih memilih golput, maka parpol harus mulai menyadari pentingnya sosialisasi para calon di setiap daerah pemilihannya masing-masing. Kebutuhan ini bukan hanya bagi kepentingan pemilih tapi juga bagi peningkatan suara pemilih parpol.

D. Faktor-Faktor yang Perlu Diperbaiki

Di samping faktor sosialisasi, teknis memilih, dan peningkatan peranan fungsi pendidikan politik parpol, hal lain yang perlu diperbaiki adalah mempermudah hak memilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT, karena pemilih yang tidak terdaftar seringkali bukan karena kesalahannya tapi karena lalainya pihak pendata awal pemilih. Karena itu, penyusunan DPS/DPT perlu diperbaiki tidak tidak selalu menjadi persoalan besar setiap pemilu. Peraturan undang-undang partai politik perlu lebih menyederhanakan jumlah partai dan jumlah calon yang berkualitas.

Sebaiknya masing-masing parpol dan calon lebih giat lagi menyosialisasikan diri agar lebih dikenal oleh para pemilih. Partai perlu lebih selektif dalam menyeleksi calon agar tidak terlalu banyak calon yang tidak bermutu sehingga membingungkan masyarakat. Calon harus kredibel, calon yang sedikit tetapi berkualitas, dan partai politik dapat menjalankan segala fungsinya. Parpol, calon, dan penyelenggara pemilu perlu melakukan sosialisasi lebih banyak, lebih gencar lagi kepada agar agar masyarakat tidak kesulitan memilih. Calon dan partai memberikan penyuluhan yang cukup agar masyarakat lebih mengenal calon yang akan dipilih. Sebaiknya partai membenahi diri sebelum mengikuti pemilu agar tidak sebagai pelengkap kontestan saja.

Aturan mengenai mekanisme perekrutan anggota KPU perlu diperbaiki agar terjaring para komisioner yang punya sikap profesional, berintegritas, dan punya kompetensi. Penyelenggara pemilu perlu lebih giat melakukan sosialisasi lebih banyak, terutama kepada para pemilih pemula dan lansia. Perlu dicoba pemilu berbasis teknologi, penyediaan sarana dan prasarana TPS bagi mahasiswa perantauan, memperbesar ukuran bilik suara, memasang foto calon, memperlebar kertas suara.

KESIMPULAN

Mahasiswa cenderung memilih parpol yang pernah ikut dan menang pada pemilu sebelumnya. Sebagian besar mahasiswa memilih untuk caleg DPR RI adalah dari Partai Demokrat (26,60%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (20,21%), dan Partai Gerindra (11,70%). Untuk DPRD Provinsi Lampung, mahasiswa memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (17,02%), Partai Gerindra (14,89%), Partai Demokrat (13,83%). Sedangkan, untuk DPRD kabupaten dan kota di Lampung mahasiswa memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (17,02%), Partai Gerindra (13,83%), Partai Demokrat (11,70%). Artinya persepsi mahasiswa terhadap ketiga partai tersebut positif, dimana PDI-P pernah menang dalam

pemilu 1999 dan pada Pemilu 2009 PD menang secara nasional. Persepsi juga menunjukkan bahwa pilihan ideologis mahasiswa adalah pada partai-partai yang berasaskan nasionalis. Sedangkan pilihan mahasiswa terhadap calon (legislatif dan gubernur, wakil gubernur) cenderung pada tokoh-tokoh yang sangat dikenal dan memiliki kedekatan emosional dengan para pemilih mahasiswa.

Dalam hal alasan mahasiswa memilih calon dan partai politik, mayoritas mahasiswa memilih parpol karena alasan kedekatan emosional dengan parpol yang bersangkutan atau dengan calon legislatif (caleg) yang diusung oleh parpol yang bersangkutan. Kedekatan emosional ini ditunjukkan dengan adanya hubungan persaudaraan, kekerabatan, atau mengenal baik calegnya. Artinya sebagian pemilih mahasiswa masih mempertimbangkan faktor sentimen primordial dalam pemilu. Alasan kedua mahasiswa memilih parpol dan calon adalah karena faktor ideologi, *platform*, program partai, atau visi dan misi yang disandang oleh parpol dan calon. Pertimbangannya adalah faktor kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok, dan menunjukkan loyalitas terhadap partai.

Sementara itu untuk aspek atau faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa sulit dalam memilih banyak

factor yang menyebabkannya. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam memilih pada Pemilu 2014 di Lampung. Mayoritas mahasiswa menganggap Pemilu 2014 banyak kesulitan untuk memberikan suara dan hanya 9,58% yang menganggap tidak mengalami kesulitan dalam memilih. Sedangkan penyebab yang dianggap paling menyulitkan dalam memilih adalah faktor nonteknis seperti terlalu banyak nama calon, banyak dari calon yang belum dikenal, kertas suara yang terlalu besar, dan tidak disertai foto calon legislatif (DPRD).

Salah satu indikator dari pelaksanaan pemilihan umum yang bermutu adalah tingginya partisipasi politik pemilih. Partisipasi politik yang tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan para calon pemimpin yang berkompetisi dalam pemilu. Dengan demikian, lembaga politik (parlemen) dan pemerintahan yang terbentuk memiliki mandat dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Untuk itu, perlu ada perbaikan dan peningkatan kualitas dari unsur-unsur yang terlibat dalam pemilu, yaitu aturan main atau undang-undang pemilu yang demokratis, partai-partai politik yang aspiratif, dan penyelenggara pemilu yang kredibel, berintegritas, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Arianto. 2011. "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 1-60.
- Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methode*. New York: John Willey and Sons, 1975.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Amin. 2014. "Golput don Politik Uang dalam Pemilu". *Suara Muhammadiyah*, Edisi Nomor 07, Tahun Ke-99, 1-15 April 2014. Hlm. 22-23.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Topo Santoso. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- _____. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Sigit Pamungkas. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

LAMPIRAN

Tabel 1. Kecenderungan Mahasiswa Memilih Parpol untuk DPR RI

No.	Nama Parpol	Frekuensi	Persentase
1.	Nasional Demokrat	8	8,51
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2,13
3.	Partai Keadilan Sejahtera	7	7,45
4.	PDI-Perjuangan	19	20,21
5.	Partai Golkar	3	3,19
6.	Partai Gerindra	11	11,70
7.	Partai Demokrat	25	26,60
8.	Partai Amanat Nasional	8	8,51
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1,06
10.	Partai Hanura	4	4,26
11.	Partai Bulan Bintang	0	0
12.	Partai Karya Pembangunan Indonesia	0	0
	Tidak memilih/Golput	6	6,38
	Jumlah	94	100

Sumber: Hertanto, penelitian 2014

Tabel 2. Kecenderungan Mahasiswa Memilih Parpol untuk DPRD Provinsi Lampung

No.	Nama Parpol	Frekuensi	Persentase
2.	Nasional Demokrat	4	4,26
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1,06
3.	Partai Keadilan Sejahtera	6	6,38
4.	PDI-Perjuangan	16	17,02
5.	Partai Golkar	12	12,77
6.	Partai Gerindra	14	14,89
7.	Partai Demokrat	13	13,83
8.	Partai Amanat Nasional	9	9,58
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2	2,13
10.	Partai Hanura	1	1,06
11.	Partai Bulan Bintang	1	1,06
12.	Partai Karya Pembangunan Indonesia	0	0
	Tidak memilih/Golput	15	15,96
	Jumlah	94	100

Sumber: Hertanto, penelitian 2014

Tabel 3. Kecenderungan Mahasiswa Memilih Parpol untuk DPRD Kabupaten/Kota

No.	Nama Parpol	Frekuensi	Persentasi
3.	Nasional Demokrat	5	5,32
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2,13
3.	Partai Keadilan Sejahtera	7	7,45
4.	PDI-Perjuangan	16	17,02
5.	Partai Golkar	7	7,45
6.	Partai Gerindra	13	13,83
7.	Partai Demokrat	11	11,70
8.	Partai Amanat Nasional	9	9,58
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6	6,38
10.	Partai Hanura	3	3,19
11.	Partai Bulan Bintang	2	2,13
12.	Partai Karya Pembangunan Indonesia	0	0
	Tidak memilih/Golput	13	13,83
	Jumlah	94	100

Sumber: Hertanto, penelitian 2014

Tabel 5. Alasan memilih parpol

No	Nama Partai	DPR-RI						DPRD Provinsi						DPRD Kabupaten/Kota								
		1	2	3	4	5	6	Jml	1	2	3	4	5	6	Jml	1	2	3	4	5	6	Jml
1	Nasdem			1	2	3	2	8			2	1	1		4			2	1	1	1	5
2	PKB		1			1		2					1		1			2				2
3	PKS		3		2	2		7	1			4	1		6			1	3	3		7
4	PDI-Perjuangan			4	10	3	2	19	1		3	6	5	1	16			2	6	7	1	16
5	Golkar				1	1	1	3	1			2	5	4	12		1	1		3	2	7
6	Gerindra			4	6		1	11			2	8	4		14		2	1	4	4	2	13
7	Demokrat	3	1	5	9	4	3	25	2		3	5	1	2	13			2	3	6		11
8	PAN	1	1		2	4		8	1				5	3	9					7	2	9
9	PPP				1			1					1	1	2	1				4	1	6
10	Hanura		1	1			2	4					1		1	1				2		3
11	Partai Bulan Bintang												1		1			1	1			2
12	PKP-I																					
	Golput							6							15							13
	Jumlah	4	7	15	33	18	11	94	6	0	10	26	26	11	94	2	3	12	18	37	9	94

Sumber: Hertanto, penelitian 2014

Keterangan alasan memilih:

1. Kapabilitas calon (pendidikan, performa, kepemimpinan)
2. *Track record* (rekam jejak) parpol,
3. Ketokohan calon (penampilan, wibawa, putra daerah, pencitraan),
4. Partai (ideologi partai, program partai, visi misi partai, partai baru),
5. Kedekatan emosional dengan partai/calon (hubungan saudara, kerabat dekat, sahabat, serta mengenal baik calon),
6. Mobilisasi (pengarahan baik dari keluarga/kerabat dekat).

Tabel 6. Alasan memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

No	Nama Calon	1	2	3	4	5	6	Jml
1	Ir. A. Aziz Adyas, S.H.							1
2	H. Achmad Syabirin H.A Koenang, MH.			4		2	1	7
3	Ir. Agusman Effendi							
4	Ahmad Farmadi Putra, S.H.							
5	H. Ahmad Jajuli, S.I.P.	1	1			3		5
6	Anandatohpati.N. R, S.Psi.							
7	Ir. Anang Prihantoro							
8	Dr. Andi Surya	3		2		3	1	9
9	Ardian Saputra							
10	Arief Budi Atmoko, S.T., M.T.							
11	Ir. H. Aryodhia Febriansya, S.H.					1		1
12	H. Ismail Zulkarnain					1		1
13	Iswandi, A.Md.							
14	H. Khairudin Gustam, S.E.							
15	Moh. Yusuf							
16	Muhyidin Tohir, S.Pd. I							
17	Ir. H. Nur Zaini							
18	Rida Budiyati, S.Kom.							
19	H. SM. Herlambang, S.H., M.H.							
20	Ir. Suhendra Ratu Prawiranegara			1		3		4
21	H. Suminto Martono, S.H.					1		1
22	Kolonel (Purn) H. Sunardi, S.Sos., M.H.							
23	Syarif, S.H.			3		3	1	7
24	Tuti W. Malano							
25	Ir. Woro Ary Werdhani							
26	Zainal Ma'arif							
	Tidak memilih							59
	Jumlah	4	1	10	0	17	3	94

Sumber: Hertanto, penelitian 2014

Keterangan alasan Memilih:

1. Kapabilitas calon (pendidikan, performa, kepemimpinan)
2. *Track record* (rekam jejak) calon,
3. Ketokohan calon (penampilan, wibawa, putra daerah, pencitraan),
4. Identifikasi partai (ideologi partai, program partai, visi misi partai, partai baru),
5. Kedekatan emosional dengan calon (hubungan saudara, kerabat dekat, sahabat, serta mengenal baik calon),
6. Mobilisasi (pengarahan baik dari pihak lain: keluarga, kerabat dekat, dll).

Tabel 8. Alasan tidak memilih pada Pemilu pada tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah	Alasan Tidak Memilih					
			1	2	3	4	5	6
1	Lampung Barat (Liwa)	3	1		2			
2	Lampung Selatan (Kalianda)	3	1		2			
3	Lampung Tengah	2			1	1		
4	Lampung Timur (Sukadana)	2	1		1			
5	Lampung Utara (Kotabumi)	4	1		3			
6	Mesuji (Mesuji)	2	1			1		
7	Pesawaran (Gedong Tataan)							
8	Tanggamus (Kotaagung)	2	1				1	
9	Tulang Bawang (Menggala)							
10	Tulang Bawang Barat	3			3			
11	Way Kanan (Blambangan)	1			1			
12	Bandar Lampung	7	5				2	
13	Kota Metro							
14	Pringsewu							
15	Pesisir Barat (Krui)	1			1			
	Jumlah	30	11	0	14	2	3	0

Sumber: Hertanto, penelitian 2014

Klasifikasi alasan tidak memilih:

1. Administratif: indikatornya yaitu tidak terdaftar di DPT wilayah masing-masing
2. Pengetahuan: tidak paham cara mencoblos
3. Teknis: sedang berpergian, ada keperluan penting, berada di luar kota
4. Ideologis: tidak mengenal calon, asumsi dasar kinerja DPR tidak dirasakan
5. Ketidakpercayaan partai politik: peserta pemilu mengindikasikan menggunakan politik uang, visi misi untuk perubahan tidak jelas.
6. Ekonomi: tidak pulang kampung karena jauh dan memerlukan biaya.

● 10% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Wulan Pri Handini. "Mekanisme Pemungutan Suara Absentee: Upaya P...	4%
	Crossref	
2	Rachmi Fatimah Nasution. "PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT MAND...	1%
	Crossref	
3	Nopi Amalia, Andi Mulyadi. "Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam M...	<1%
	Crossref	
4	Ismail Ismail, Andi Pangerang Moenta, Zulkifli Aspan. "Fungsi Dewan P...	<1%
	Crossref	
5	Muhammad Aqil Irham. "Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Stud...	<1%
	Crossref	
6	Medan Yonathan Mael. "POLA REKRUTMEN CALON DPRD PARTAI POL...	<1%
	Crossref	
7	Irtanto Irtanto. "Perilaku Politik Pemilih Perempuan Kota Mojokerto Pa...	<1%
	Crossref	
8	Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah. "IMPLEMENTASI KEBI...	<1%
	Crossref	
9	Ridho Imawan Hanafi. "Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru ...	<1%
	Crossref	

- 10 **Rahmat Saputra. "Rekonstruksi Politik Hukum Undang-Undang Aparatu... <1%**
Crossref
-
- 11 **Karman Karman. "DOMINASI WACANA ANTI-POLITIK BARAT PADA M... <1%**
Crossref
-
- 12 **Siti Aminah, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, Yohanes Sitorus. "PE... <1%**
Crossref
-
- 13 **Efriza Efriza. "Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak ... <1%**
Crossref
-
- 14 **Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad. "KEADILAN DALAM PEMILU BED... <1%**
Crossref
-
- 15 **Ferdinand Eskol Tiar Sirait. "Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Mem... <1%**
Crossref
-
- 16 **Sukawati Lanang Putra Perbawa. "PEMILU SERENTAK 2019 (PROBLE... <1%**
Crossref
-
- 17 **Ahmad Riyadh U.B., Hendra Sukmana. "MODEL REKRUTMEN POLITIK ... <1%**
Crossref
-
- 18 **Fauzan Ali Rasyid. "Konfigurasi politik hukum ekonomi syariah di Indon... <1%**
Crossref
-
- 19 **Hamlan Andi Baso Malla. "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Ber... <1%**
Crossref
-
- 20 **Totok Wahyu Abadi, Ridlaty Ayu Oktaviana Putri. "Media dan Perilaku P... <1%**
Crossref